

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005: 8).

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data dari Laporan *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), November 2007, menyebutkan, peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari 58 ke 62. Dalam peringkat 130 negara itu, Malaysia berada di urutan ke-56 dan Korsel peringkat ke-5. Daya saing Indonesia menurut *World Economic Forum*, 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7. Tidak pelak lagi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penyebab rendahnya daya saing di samping infrastruktur, birokrasi, lingkungan, serta perangkat dan penegakan hukum (Akbari, 2009).

Ada dua fakta penting terkait pembangunan pendidikan Indonesia yang perlu dicermati sepanjang tahun 2007. Pertama, laporan capaian Millenium Development Goals (MDG's). MDG's Report in Indonesia 2007 yang dipublikasikan Bappenas bersama Bank Dunia menyimpulkan, Indonesia sudah

dalam jalur yang benar. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di dunia dengan prestasi bagus dalam pencapaian angka partisipasi murni (APM) sekolah di sekolah lanjutan (SLTP maupun SLTA) mendekati angka 100 persen (Henry, 2008).

Kenyataan bahwa keunggulan suatu bangsa bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu generasi muda penerus bangsa yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Hal ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong para pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian sistematis untuk membenahi dan atau memperbaiki sistem pendidikan nasional (Tola dan Furqon, 2004 : 1). Pemerintah melontarkan gagasan tentang manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (*school-based management*) yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakat untuk menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, agar keluaran sekolah mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan dan tantangan tersebut. Sejalan dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, maka fungsi-fungsi pengelolaan sekolah perlu diberdayakan secara maksimal agar dapat berjalan secara efektif untuk menghasilkan mutu lulusan yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Implementasi gagasan tersebut perlu didukung oleh model penilaian sekolah efektif yang merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pengelola pendidikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan setiap sekolah. Hasil penilaian selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan upaya perbaikan sekolah umumnya dan layanan belajar khususnya.

Sejumlah persoalan yang dihadapi, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah adalah salah satu bentuk alternatif sebagai hasil kebijakan desentralisasi bidang pendidikan. Sebagai wujud dari reformasi pendidikan, pembelajaran berbasis sekolah pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan dipihak lain semakin meningkatkan otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumberdaya yang ada untuk berinovasi.

Disamping itu, model pengelolaan sekolah ini juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator yang profesional. Akibatnya sekolah akan responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah, agar prestasi belajar siswa akan dapat dioptimalkan. Akibatnya sekolah akan responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah, agar prestasi belajar siswa akan dapat dioptimalkan. Pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah menuntut komitmen semua unsur yang terkait yaitu peran seluruh *stakeholders* (personel sekolah, orang tua siswa, siswa dan masyarakat luas) serta dalam pelaksanaan pihak sekolah perlu memperhatikan komponen-komponen konteks, input, proses, output serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut.

Melihat kenyataan di lapangan, bahwa pada tahun pelajaran 2005/2006 nilai UAN di SMP Negeri 7 Klaten rata-rata sebanyak 6,90, tahun 2006/2007 mempunyai rata-rata sebanyak 7,10, pada tahun 2007/2008 mempunyai rata-rata nilai UAN sebanyak 7,15, dan pada tahun ajaran 2008/2009 nilai UAN rata-rata sebanyak 7,30. Ini membuktikan bahwa ketuntasan belajar para siswa di SMP N 7 Klaten tergolong cukup (Daftar Hasil UAN SMP N 7 Klaten, 2009).

Dilihat dari personel pendidik atau guru, di SMP N 7 Klaten terdapat kurang lebih 58 orang, dari jumlah tersebut guru yang mempunyai tingkat pendidikan D3 sebanyak 18 orang (31,03%), S1 sebanyak 31 orang (53,45), dan yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang (15,52%), dari keseluruhan guru yang bertugas di SMP Negeri 7 Klaten. Ini membuktikan bahwa kebanyakan personil guru di SMP Negeri 7 Klaten kebanyakan memiliki tingkat pendidikan DIII dan S1.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 7 Klaten diperlukan upaya-upaya perbaikan baik mutu guru maupun mutu siswa. Berbagai upaya tersebut misalnya banyaknya pelatihan guru, peningkatan kualitas guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kepemimpinan dan manajemen sekolah, tetapi ironisnya fluktuasi mutu pendidikan di SMP Negeri 7 Klaten kurang maksimal.

Melihat hal tersebut terlihat bahwa sebenarnya jumlah tenaga pengajar sudah mencukupi dilihat dari tingkat pendidikan, namun dilihat dari nilai rata-rata hasil ujian sekolah diketahui nilai tertinggi hanya sebesar 7,89, dan nilai

terendah 6,39, hal inilah membuktikan bahwa antara tingkat pendidikan yang dimiliki guru kurang sebanding dengan prestasi yang diperoleh anak didiknya. Usaha yang selama ini dilakukan guru-guru di SMP Negeri 7 Klaten belum maksimal, ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: sarana dan prasarana yang kurang lengkap, perencanaan pembelajaran yang kurang baik, metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kemampuan anak, dan lain sebagainya. Di samping itu, tampak bahwa sumber-sumber belajar di sekolah lebih banyak mewarnai perilaku peserta didik, karena itu pelaku pendidikan perlu melakukan perubahan mendasar baik pada proses maupun output pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang baik harus dipandu dengan kurikulum yang baik, adaptif, dan mampu menghasilkan *output* yang siap menghadapi tantangan internal dan eksternal globalisasi.

Berdasarkan keadaan SMP Negeri 7 Klaten tahun pelajaran 2008/2009 telah dijadikan sebagai sekolah rintisan dalam pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah dengan diberikannya dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Pemberian dana ini dimaksudkan sebagai “dana pancingan” agar sekolah dapat mencari terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus sebagai rangsangan agar sekolah lebih mampu menggali partisipasi masyarakat. Serta dipandang memenuhi syarat atau memiliki faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen peningkatan kualitas berbasis sekolah untuk daerah Kabupaten Klaten, juga mengingat beberapa unsur yang menunjang di sekolah tersebut.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, ada satu fokus masalah yang akan diteliti. Fokus dimaksud “Bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten. Fokus tersebut dirinci menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimana perencanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten?
2. Bagaimana model pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten?
3. Bagaimana model penentuan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan fokus masalah, ada tiga tujuan yang ingin dicapai.

1. Mendeskripsikan perencanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten.
2. Mendeskripsikan model pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten.
3. Menemukan model penentuan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat.

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka pengambilan keputusan

dan kebijakan untuk memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah.

2. Bagi SMP Negeri 7 Klaten, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah yang lebih baik.
3. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong dilakukannya penelitian yang lebih mendalam lagi dalam aspek yang lain sehingga akan dapat memperbanyak informasi mengenai pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah.